



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
Jalan Ibrahim Sattah, Air Padang, Tarempa Timur, Siantan, Kepulauan Anambas,  
Kepulauan Riau 29791, Laman [anambaskab.go.id](http://anambaskab.go.id), Pos-el [bppd@anambaskab.go.id](mailto:bppd@anambaskab.go.id)

Tarempa, 11 September 2025

Yth. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Kepulauan Anambas  
di

Tempat

SURAT PENGANTAR  
Nomor: B/000.5.3.1/063/BPPD/SPNGT/09/2025

No	Barang yang Dikirimkan	Jumlah	Ket
1.	Rancangan Ahir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026	1 Berkas	Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih



Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah  
Sekretaris,

Ramadiana, S.I.P.  
Penata Tingkat I, III-d  
NIP 197904122000122001



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
TAHUN 2026**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 ini dapat diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan rencana kegiatan serta rencana sub kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2026 dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan wilayah Negara dan kawasan perbatasan.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua stakeholder dan/ataupihak pemangku kepentingan.

Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 11 September 2025

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLA  
PERBATASAN DAERAH



TET ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19790101 200212 2 009

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.....</b>	<b>8</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja TahunLalu.....	8
2.2. Analisis Kinerja PelayananPerangkat Daerah .....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD .....	21
2.4. Reviu Terhadap Rancangan AwalRKPD .....	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	30
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN.....</b>	<b>31</b>
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	34
3.3. Program dan Kegiatan .....	34
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>42</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>48</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1	Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik Tahun Anggaran 2024.....	10
Tabel. 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPD dan Pencapaian Renstra BPPD s/d Tahun 2024.....	13
Tabel. 2.3	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra.....	18
Tabel. 2.4	Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas....	19
Tabel. 2.5	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.....	25
Tabel. 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026.....	29
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026.....	35
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.....	37
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Tahun 2026.....	43



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja merupakan acuan dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 – 2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitikberatkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah. Ranwal Rencana Kerja Tahun 2026

dirumuskan untuk menyinkronkan dan menunjang visi, misi Kepala Daerah pada Tahun 2026 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tema **“Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar dan Daya Saing Daerah melalui Pengembangan Pariwisata dan Perikanan yang Berbasis pada Potensi Lokal serta Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Inovatif”**. Program dan Kegiatan dimaksud mengakomodir tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan perbatasan daerah.

Dalam rangka mensinergikan tujuan pemerintah daerah dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2026.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kepulauan Anambas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106);
  8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 4405);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2020 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 82);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta sasaran yang ingin di capai pada Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

#### **b. Tujuan**

Tujuan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026 dalam rangka :

1. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah di bidang pengelolaan perbatasan yang mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
2. Tersedianya pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

3. Tersedianya acuan bagi pelaksanaan kegiatan tahunan yang akan dijalankan oleh seluruh pegawai baik pejabat structural, pejabat fungsional maupun pelaksana pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah;
4. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2025 untuk penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025;
5. Sebagai dasar pengukuran dan penilaian kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mudah melakukan koreksi atas berbagai penyimpangan dari target yang telah ditetapkan;
6. Tersedianya acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam hal pengelolaan perbatasan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang Rancangan Rencana Kerja, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan capaian Rencana Strategis, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Menggambarkan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Menggambarkan program dan kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026.

### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPPD**

Evaluasi realisasi capaian target diperlukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan realisasi target kinerja dari program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai Renstra yang telah ditetapkan, untuk dapat mengetahui program/kegiatan dan sub kegiatan mana yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan sebaliknya, sehingga dapat diambil kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang tepat untuk mengatasinya.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 terdiri dari program/kegiatan dan subkegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, agar program kegiatan dan subkegiatan yang terdapat pada BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas bisa terakomodir pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 serta pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 sehingga tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas di alokasikan anggaran sebesar Rp. 3.556.486.368 (Tiga Miliar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) dimana alokasi anggaran tersebut sudah termasuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Dan sangat diharapkan dalam pengalokasian

anggaran pengawasan dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku, dengan alokasi anggaran yang maksimal guna meningkatkanpengelolaan perbatasan negara Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada Tahun 2024 BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki pagu dana yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp. 3.836.213.006 (Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Rupiah),dengan realisasi Rp. 3.049.648.055 (Tiga Miliar Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Lima Puluh Lima Rupiah) atau 79,36%, sedangkan realisasi fisik mencapai 96,93% sebagaimana tertera pada table 2.1 berikut :

Tabel 2.1  
Capaian Persentase (%) Realisasi Keuangan Dan Fisik  
Tahun Anggaran 2024

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase (%) Realisasi s.d. 31 Desember 2024		
			Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3,570,919,536</b>	<b>2,886,191,354</b>		
<b>I</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>16,500,000</b>	<b>16,500,000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16,500,000	16,500,000	100	100
<b>II</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.545116.963</b>	<b>2,207,045,456</b>		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.410.285.463	2,122,195,456	88.05	100
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	112.440.000	65,950,000	58.65	100
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.391.500	18,900,000	84.41	100
<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>7,308,000</b>	<b>4,872,000</b>		
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	7,308,000	4,872,000	66.67	100
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>19,800,000</b>	<b>19,800,000</b>		
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	19,800,000	19,800,000	100	100
<b>V</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>453.343.041</b>	<b>311,828,710</b>		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,993.110	0	0.00	100
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.084.351	2,737,731	30,13	100
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	85.137.240	35,888,370	42.15	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.364.340	0	0.00	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	336.764.000	273,202,969	81.13	81.13
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>266.263.800</b>	<b>128,728,800</b>		
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.614.000	0		
2	Pengadaan Mebel	38.000.000	0	99,74	100
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.221.000	24,300,000	54.95	100

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Persentase (%) Realisasi s.d. 31 Desember 2024		
			Rp	%	Fisik (%)
1	2	3	4	5	6
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	104.428.800	104.428.800	100	100
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>253.434.446</b>	<b>194,468,002</b>		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	43,295,500	2,318,500	5.36	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23,260,000	22,557,632	96.98	100
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,878,946	169,591,870	90.75	100
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>9,153,286</b>	<b>2,948,386</b>		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4,053,900	501,900	28.24	100
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,099,386	2,446,486	47.98	100
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>265,293,470</b>	<b>163,456,701</b>		
<b>I</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>77,437,300</b>	<b>60,396,543</b>		
1	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	77,437,300	60,396,543	77.99	93.39
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>77,463,170</b>	<b>54,223,158</b>		
1	Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	77,463,170	54,223,158	70.00	71.22
<b>III</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>110,393,000</b>	<b>48,837,000</b>		
1	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	110,393,000	48,837,000	44.24	75.67
	<b>JUMLAH</b>	<b>3,836,213,006</b>	<b>3,049,648,055</b>	<b>79,48</b>	<b>96,93</b>

Faktor yang menyebabkan realisasi keuangan tidak tercapai 100% adalah adanya defisit anggaran pada APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 sehingga membuat Pengguna Anggaran waswas dalam mengelola/melaksanakan program/kegiatan karena adanya kemungkinan tidak dapat dicairkan. Hal ini diperparah lagi dengan tidak adanya Perubahan APBD sehingga tidak dapat dilakukan penyesuaian anggaran sebagaimana mestinya.

Implikasi (hasil akhir/kesimpulan) yang timbul terhadap target capaian program Renstra BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah beberapa Program dan Kegiatan yang telah direncanakan pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2024 tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target capaian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kebijakan dan/atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatas adalah perlunya melakukan rekrutmen dan/atau penambahan personil PNS/ASN yang berkompeten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPPD.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPPD Tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BPPD dan Pencapaian Renstra BPPD s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja P Derangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan					
					Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan s/d Tahun	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
5	<b>Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan</b>													
5	06	<b>Badan Pengelola Perbatasan Daerah</b>												
5	06	01	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>											
5	06	01	2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>										
5	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	25 Dokumen	80,1%
5	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Jumlah Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026

5	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah yang disusun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kKinerja SKPD	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
5	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 Dokumen	75%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
5	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	13 Orang/ Bulan	14Orang/ Bulan	14 Orang/ Bulan	100%	14 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	50%
5	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	4 Dokumen	66,7%
5	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	60%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
5	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Kelengkapan yang Diadakan	150 Stel	-	20 Stel	20 Stel	-	-	20 Stel	13,3%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026

5	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	4 Paket	66,7%
5	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
5	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66,7%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
5	06	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	11 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	6 Unit	54,5%
5	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Unit	20	26 Unit	26 Unit	100%	22 Unit	68 Unit	123%
5	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	3 Unit	5 Unit	3 Unit	60%	6 Unit	12 Unit	48%
5	06	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	3 Unit	60%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026

5	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	4 Laporan	66,7%
5	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
5	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	75%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
5	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	-	3 Unit	3 Unit	100%	3 Unit	3 Unit	37,5
5	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	38 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	5 Unit	15 Unit	39,5%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola</b>								
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.01</b>		<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>								
5	06	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri</b>								
5	06	02	2.02	01	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	-	1 Dokumen	20%

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026

5	06	02	2.02	03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	5 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	20%
<b>5</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>2.03</b>		<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</b>								
5	06	02	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan	5 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	40%

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai dengan Dokumen Rancangan Strategi (Renstra) BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan target perangkat daerah. Rencana Strategi (Renstra) BPPD untuk 5 (lima) tahun ke depan. Berikut disampaikan target indikator yang telah disusun, hubungan antara tujuan, sasaran, serta indikatornya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3  
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Renstra

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	26,65	29,32	32,25	35,47	39,02	42,92
		Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	20	40	60	80	100	100
2.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)

Analisis kinerja pelayanan BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas sesuai dengan Renstra tertuang sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Pencapaian Kinerja BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra BPPD						Realisasi Capaian Tahun Lalu			Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.	Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri			26,65%	29,32%	32,25%	35,47%	39,02%	42,92%	19,81%	26,81%	20,34%	35,47%	39,02%	
2.	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara			20%	40%	60%	80%	100%	100%	20%	20%	20%	80%	100%	
3.	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	C (40,49)	Berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2023 BPPD Tidak dilakukan penilaian	B (61,2)	BB (71)	
4.	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah			-	C (50)	CC (56,6)	B (61,2)	BB (71)	BB (76)	-	D (22,2)	B (65,75)	B (61,2)	BB (71)	

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat/kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan indikator sasaran organisasi yaitu :

a. Faktor Pendorong

- BPPD merupakan Perangkat Daerah yang baru dibentuk sehingga masih memiliki energi dan semangat baru dalam mewujudkan pembangunan di wilayah perbatasan.
- Adanya perhatian yang besar dari presiden Joko Widodo terhadap daerah perbatasan dengan jargoannya membangun dari pinggiran (perbatasan) serta menjadikan daerah perbatasan sebagai beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Faktor Penghambat

- Belum memadainya jumlah ASN pada BPPD.
- Belum optimalnya koordinasi dalam perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan baik antar instansi horizontal maupun vertikal, baik dengan Pemerintah Provinsi maupun dengan Pemerintah Pusat.
- Masih lemahnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar sector dan antar daerah dalam pengelolaan batas wilayah.
- Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih minim dan pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan belum memadai, sehingga pengawasan dan penjagaan tanda batas wilayah negara tidak berjalan maksimal.
- Belum optimalnya dukungan anggaran dalam rangka peningkatan Kapabilitas dan Kinerja BPPD.

### **2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas masih belum optimal. Beberapa indikator dan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang berakitan dengan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
2. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
4. Belum optimalnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Indikator dan isu-isu strategis yang ada akan berimplikasi terhadap capaian visi misi Kabupaten Kepulauan Anambas yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Implikasi yang akan muncul berdampak pada inkonsistensi antara produk perencanaan, produk penganggaran, produk monitoring evaluasi sampai dengan pelaporan kegiatan. Sampai pada akhirnya akan berdampak pada penilaian Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Formulasi isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program/kegiatan dalam bentuk tiga rekomendasi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pengembangan Pembangunan Daerah
  - a. Inovasi-inovasi dibidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
  - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan untuk meminimalkan deviasi terhadap visi dan misi;
  - c. Memanfaatkan peluang untuk menentukan kebijakan dan proses perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi pembangunan kota secara lebih terstruktur.
2. Sumber Daya Manusia Aparatur
  - a. Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
  - b. Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur;
  - c. Kriteria kelayakan sumberdaya manusia sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.
3. Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah
  - a. Mengembangkan Teknologi Informasi (TI) dan *Geographic Information System* (GIS) serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan;
  - b. Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimalisasi pemeliharaan;
  - c. Optimalisasi ruangan untuk memenuhi *standard* kelayakan kerja.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola

Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021–2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan di Kecamatan Lokpri dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pembangunan perbatasan negara di Kecamatan Lokpri
2. Strategi Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi dengan Stake holder dalam menjaga dan memelihara Tanda Batas Wilayah Negara dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (renaksi) pengelolaan Batas Wilayah Negara di Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT).
3. Strategi Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan bersih dilaksanakan dengan arah kebijakan :
  - Melakukan penguatan pengawasan internal dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja aparatur
  - Meningkatkan kualitas layanan dukungan pengelolaan SDM, tata laksana, dan dukungan manajemen lainnya terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
  - Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan anggaran dan laporan keuangan serta menindaklanjuti rekomendasi BPK

#### **2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan serta sub kegiatan, indikator kinerja, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu

indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan pada BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Gambaran identifikasi kebutuhan program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Reviu Terhadap Rancangan RKPD BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>3.685.965.911,24</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>3.685.965.911,24</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</b>			<b>200.000</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</b>			<b>200.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	200.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	200.000
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3.069.982.063</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3.069.982.063</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	26 Orang/ Bulan	2.937.942.063,24	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	26 Orang/ Bulan	2.937.942.063,24
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>7.308.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>7.308.000</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>-</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>-</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	-	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	-	-
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>387.175.848</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>387.175.848</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	79.200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	79.200.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	25.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	25.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	267.094.167	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	267.094.167

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>95.300.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>95.300.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	0 Unit	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	15 Unit	300.000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	15 Unit	300.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	6 Unit	300.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	6 Unit	300.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.700.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.700.000
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>110.000.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>110.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	40.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	40.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	50.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	KKA	1 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	KKA	1 Laporan	20.000.000

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif
		Kantor yang Disediakan					Kantor yang Disediakan			
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>16.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>16.000.000</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	10.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	8 Unit	6.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	8 Unit	6.000.000
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola</b>		<b>100%</b>	<b>371.976.152</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola</b>		<b>100%</b>	<b>371.976.152</b>
	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>			<b>140.000.000</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>			<b>140.000.000</b>
	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	140.000.000	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	140.000.000
	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri</b>			<b>100.000.000</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri</b>			<b>100.000.000</b>
	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	100.000.000	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	100.000.000

NO.	Rancangan Rencana Kerja					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/ n/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	
	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</b>			<b>131.976.152</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</b>			<b>131.976.152</b>	
	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	131.976.152	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	131.976.152	
<b>JUMLAH</b>					<b>4.057.942.063,24</b>	<b>JUMLAH</b>					<b>4.057.942.063,24</b>

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, Asosiasi-asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari PD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada PD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD dari pengembangan penelitian dan pelaksanaan musrenbang Desa, Kecamatan dan Kabupaten sebagai agenda rutinitas tahunan dalam perencanaan pembangunan. Pada Renja Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026 tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat. Program/kegiatan yang diajukan pada Renja adalah rutinitas pengelolaan perbatasan dan inisiatif dari Pemerintah Daerah, berikut tabel penelaahan usulan program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	Tidak Ada Usulan				

### **BAB III**

## **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025, pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dilaksanakan sesuai kebijakan pembangunan nasional dengan memenuhi prinsip-prinsip:

1. Membangun Kemandirian

Pembangunan dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai kondisi masyarakat, pranata sosial yang ada, serta memanfaatkan kelebihan dan kekuatan bangsa Indonesia.

2. Menjamin Keadilan

Pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum.

3. Menjaga Keberlanjutan

Pembangunan dilaksanakan secara keberlanjutan untuk memastikan bahwa upaya pembangunan guna memenuhi kebutuhan saat ini sekaligus mempertimbangkan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan pada saatnya nanti.

Pelaksanaan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut di atas, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pembangunan ekonomi di Kawasan Perbatasan negara dilaksanakan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu: pendekatan pengelolaan sumber daya ekonomi dan pendekatan peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan

kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Dalam mewujudkan keunggulan kompetitif, pengembangan wilayah dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan pertumbuhan dan pendekatan pemerataan, sebagaimana tercermin dari pendekatan koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan berbasis wilayah pulau. Koridor pertumbuhan berorientasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pengembangan kawasan-kawasan pertumbuhan, meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI), DPP, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), kota-desa serta kawasan aglomerasi perkotaan pada kabupaten/kota yang terletak pada koridor pertumbuhan. Sementara koridor pemerataan berorientasi untuk pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata melalui pengembangan PKW, dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sehingga terbentuk pusat-pusat pelayanan dasar baru yang menjangkau daerah pelayanan yang lebih luas, pada kabupaten/kota pada koridor pemerataan.

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing  
Kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Pemenuhan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui strategi pembangunan berupa penyediaan Infrastruktur Pelayanan Dasar,

Infrastruktur Ekonomi, Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan, Infrastruktur digital.

6. Membangun Lingkungan Hidup

Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup. Pembangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem lingkungan hidup, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pengelolaan sumber daya alam sekaligus melakukan upaya perlindungan dan pengembangan, serta meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik

Kebijakan penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan, dan transformasi pelayanan publik dilaksanakan melalui strategi Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dan Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2025 menjabarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan di atas yang difokuskan pada 2 (dua) agenda pembangunan, yaitu agenda ke-2 Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan dan agenda ke-7 Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik. Kedua agenda pembangunan tersebut diturunkan ke dalam 4 (empat) arah strategis pengelolaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan yaitu:

1. Pengelolaan Batas Wilayah Negara

Mewujudkan penetapan dan penegasan Batas Wilayah Negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.

2. Pengelolaan Aktivitas Lintas Batas Negara

Mewujudkan peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antarnegara.

3. Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara  
Mewujudkan peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dan Kawasan Perbatasan  
Mewujudkan pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antarruang yang berkelanjutan.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan dan sasaran dalam Renja Perangkat Daerah adalah turunan penjabaran tujuan Renstra Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah, dan akan membantu mempermudah penilaian kinerja.

Berdasarkan hasil analisis dengan mempertimbangkan permasalahan, isu strategis dan tinjauan faktor eksternal, maka Badan Pengelola Perbatasan Daerah menetapkan 2 (dua) Tujuan pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, yaitu :

- 1. Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel;**
- 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas.**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026, sebagai berikut :

- 1. Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara;**
- 2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih.**

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran dan formulasi/rumus perhitungan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai sasaran Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sampai dengan tahun 2021-2026 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) masing-masing bagian/bidang selaku penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Berikut Tabel 3.1 mengenai Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja dalam rangka pencapaian Tujuan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan yang berkualitas, sinergis dan kredibel		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	Persen	42,92
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah Negara	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaan tanda batas wilayah Negara	Persen	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas		Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	Nilai	BB (76)
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	BB (76)

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan disertai kebutuhan pendanaan yang dimuat dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, merupakan turunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang telah terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Program pembangunan ini sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 dan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026, serta menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Setiap program selanjutnya diterjemahkan ke dalam kegiatan prioritas. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Dengan tersusunnya rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dalam periode perencanaan pembangunan selama satu tahun, maka selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Perbatasan Daerah tahun 2026 yang dalam pelaksanaannya diharapkan konsisten.

Dalam Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 ini memuat 2 (dua) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 23 Sub kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Program, 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Subkegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Perbatasan Daerah dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dan serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronisasikan dengan peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan

pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan program dan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program guna terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran rencana strategis Tahun 2021-2026 serta pencapaian visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Untuk lebih jelasnya mengenai Tujuan, Sasaran dan indikator Renstra-PD yang terkait dengan rumusan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, lokasi kegiatan dan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2  
Rumusan Rencana Kerja Program Dan Kegiatan Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027  
BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif		Target Kerja	Pagu Indikatif
5.06.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		100%	3.685.965.911,24		100%	3.774.913.606
5.06.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</b>			200.000			35.000.000
5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	200.000		6 Dok	35.000.000
5.06.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			3.069.982.063			3.110.460.606
5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	26 Orang/ Bulan	2.937.942.063,24		26 Orang/ Bulan	2.978.420.606
5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000		1 Dok	112.440.000
5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000		1 Laporan	19.600.000
5.06.01.2.03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			7.308.000			8.000.000
5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000		1 Laporan	8.000.000
5.06.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			-			0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif		Target Kerja	Pagu Indikatif
5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	-		1 Paket	0
<b>5.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>387.175.848</b>			<b>452.764.000</b>
5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164		1 Paket	6.000.000
5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517		1 Paket	11.000.000
5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	79.200.000		1 Paket	80.000.000
5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	25.000.000		1 Paket	19.000.000
5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	267.094.167		1 Laporan	336.764.000
<b>5.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>95.300.000</b>			<b>-</b>
5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	0 Unit	-		0 Unit	0
5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	15 Unit	300.000		10 Unit	0
5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	6 Unit	300.000		5 Unit	0
8.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.700.000		1 Unit	0
<b>5.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>110.000.000</b>			<b>152.689.000</b>

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja)  
Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tahun 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2026			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif		Target Kerja	Pagu Indikatif
5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	40.000.000		1 Laporan	40.000.000
5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	50.000.000		1 Laporan	33.489.000
5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	20.000.000		1 Laporan	79.200.000
<b>5.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>16.000.000</b>			<b>16.000.000</b>
5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	10.000.000		3 Unit	10.000.000
5.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	8 Unit	6.000.000		8 Unit	6.000.000
<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola</b>		<b>100%</b>	<b>371.976.152</b>		<b>100%</b>	<b>306.000.000</b>
<b>5.06.02.2.01</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>			<b>140.000.000</b>			<b>106.000.000</b>
5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	140.000.000		1 Dok	106.000.000
<b>5.06.02.2.02</b>	<b>Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan</b>	<b>Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri</b>			<b>100.000.000</b>			<b>90.000.000</b>
5.06.02.2.02.03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	100.000.000		1 Dok	90.000.000
<b>5.06.02.2.03</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi</b>			<b>131.976.152</b>			<b>110.000.000</b>
5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	131.976.152		1 Dok	110.000.000
<b>Jumlah</b>					<b>4.057.942.063,24</b>			<b>4.080.913.606</b>

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi satu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja berpedoman pada RENSTRA Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja yang disusun ini merupakan bagian yang utuh dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Tahun 2021-2026.

Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Dalam Negeri 2020-2025. Adapun rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana disajikan dalam Tabel 4.1.berikut.

Tabel 4.1  
Program dan Kegiatan Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di BPPD Kabupaten Kepulauan Anambas</b>	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di BPPD yang baik dan bersih	Predikat Nilai RB Perangkat Daerah	<b>5.06.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>3.685.965.911,24</b>	<b>APBD</b>	
		Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah	<b>5.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun</b>			<b>200.000</b>	<b>APBD</b>	
			5.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KKA	6 Dok	200.000	APBD	
			<b>5.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>3.069.982.063</b>	<b>APBD</b>	
			5.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KKA	26 Orang/Bulan	2.937.942.063,24	APBD	
			5.06.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	KKA	1 Dok	112.440.000	APBD	
			5.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	KKA	1 Laporan	19.600.000	APBD	
			<b>5.06.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>			<b>7.308.000</b>		
			5.06.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	KKA	1 Laporan	7.308.000		
	<b>5.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>							

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
			5.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KKA	1 Paket	-		
			<b>5.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>387.175.848</b>	<b>APBD</b>	
			5.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	5.015.164	APBD	
			5.06.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	KKA	1 Paket	10.866.517	APBD	
			5.06.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	KKA	1 Paket	79.200.000	APBD	
			5.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	KKA	1 Paket	25.000.000	APBD	
			5.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KKA	1 Laporan	267.094.167	APBD	
			<b>5.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>95.300.000</b>	<b>APBD</b>	
			5.06.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	KKA	0 Unit	-	APBD	
			5.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	KKA	15 Unit	300.000	APBD	
			5.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	KKA	6 Unit	300.000	APBD	
			8.06.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	KKA	1 Unit	94.700.000	APBD	
			<b>5.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan</b>			<b>110.000.000</b>	<b>APBD</b>	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
					<b>Pemerintahan Daerah</b>					
			5.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KKA	1 Laporan	40.000.000	APBD	
			5.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KKA	1 Laporan	50.000.000	APBD	
			5.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KKA	1 Laporan	20.000.000	APBD	
			<b>5.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>16.000.000</b>	<b>APBD</b>	
			5.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	KKA	3 Unit	10.000.000	APBD	
			5.06.01.2.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara	KKA	8 Unit	6.000.000	APBD	
<b>Mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan</b>		Persentase capaian penyusunan perencanaan pembangunan yang diakomodir berdasarkan lokpri	<b>5.06.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN</b>	<b>Persentase Lokpri perbatasan yang dikelola</b>		<b>100%</b>	<b>371.976.152</b>	<b>APBD</b>	
	Terjaga dan terpeliharanya Tanda Batas Wilayah	Persentase terlaksananya penjagaan dan pemeliharaa	<b>5.06.02.2.01</b>	<b>Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>	<b>Persentase Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama</b>			<b>140.000.000</b>	<b>APBD</b>	
			5.06.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang disusun	KKA	1 Dok	140.000.000	APBD	

Tujuan	Sasaran	Indikator	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Kerja	Pagu Indikatif	Sumber	Ket
yang berkualitas, sinergis dan kredibel	Negara	n tanda batas wilayah Negara	5.06.02.2.02	Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan	Persentase Pelaksanaan urusan Kewilayahan di Kecamatan Lokpri			100.000.000	APBD	
			5.06.02.2.02.03	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	KKA	1 Dok	100.000.000	APBD	
			5.06.02.2.03	Monitoring dan Evaluasi	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi			131.976.152	APBD	
			5.06.02.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	KKA	1 Dok	131.976.152	APBD	
<b>JUMLAH</b>								<b>4.057.942.063,24</b>		

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rancangan Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah adalah dokumen tahunan yang menjabarkan tugas pokok dan fungsi berikut sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Penyusunan Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam pengaplikasian berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Catatan penting yang menjadi perhatian terangkum dalam rekomendasi untuk menjawab isu strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 terangkum dalam tiga hal mendasar yang menjadi perhatian yang antara lain perencanaan pengembangan perencanaan daerah, sumberdaya manusia aparatur dan sarana prasarana dan pengembangan wilayah. Rencana tindak lanjut tersebut dituangkan dalam rencana program/kegiatan Badan Pengelola Perbatasan Daerah yang kemudian menjadi dasar dalam RAPBD Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja. Rencana Kerja juga memberikan *feedback* yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Badan Pengelola Perbatasan Daerah sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Tarempa, 11 September 2025

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA  
PERBATASAN DAERAH



TEJI ARNITA, SE

Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19790101 200212 2 009

